

## Analisis Prinsip Non-Interference Dalam Asean Way: Implikasi Bagi Stabilitas Ekonomi-Keamanan Di Asia Tenggara

Anastasia Meilin Gita Permata Laia<sup>1</sup>, Gadir Zeffilda<sup>2</sup>

Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Email: [gitalaia25@gmail.com](mailto:gitalaia25@gmail.com), [gadir.zeffilda@gmail.com](mailto:gadir.zeffilda@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research examines the principle of non-interference in the ASEAN Way and its implications for economic stability and security in Southeast Asia. As a cornerstone of ASEAN, this principle aims to maintain regional harmony by respecting the sovereignty of member states. However, its implementation faces challenges, particularly in addressing transnational issues such as economic integration through the ASEAN Economic Community (AEC) and the South China Sea disputes. The study adopts a constructivist approach and two-level game theory to analyze how domestic and international dynamics influence the effectiveness of this principle. The findings indicate that the non-interference principle creates a dilemma between preserving national sovereignty and the need to strengthen regional cooperation. In the context of the AEC, differences in economic development levels among member states often hinder policy harmonization in trade. Meanwhile, the South China Sea disputes highlight ASEAN's limitations in confronting external aggression, although consensus-building and quiet diplomacy have helped maintain internal solidarity. The principle also slows decision-making on urgent strategic issues. The study recommends that ASEAN adapt its application of the non-interference principle to be more responsive to contemporary challenges. A more flexible approach and robust enforcement mechanisms are necessary to enhance the effectiveness of regional policies. By strengthening collective identity and regional norms, ASEAN can bolster regional stability, improve economic competitiveness, and respond to global challenges more effectively and sustainably.*

**Keywords:** ASEAN Way, AEC, SCS, Two-Level Game Theory

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji prinsip non-interference dalam ASEAN Way dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan di Asia Tenggara. Sebagai pilar utama, prinsip ini bertujuan menjaga keharmonisan regional dengan menghormati kedaulatan negara anggota. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, terutama dalam menangani isu-isu transnasional seperti integrasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community (AEC) dan sengketa Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dan two-level game theory untuk menganalisis bagaimana dinamika domestik dan internasional memengaruhi efektivitas penerapan prinsip ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-interference menciptakan dilema antara menjaga kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk memperkuat kerja sama regional. Dalam konteks AEC, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara anggota sering menghambat harmonisasi kebijakan perdagangan. Sementara itu, sengketa Laut Cina Selatan menyoroti keterbatasan ASEAN dalam menghadapi agresi eksternal, meskipun pendekatan konsensus dan diplomasi tenang membantu menjaga solidaritas internal. Prinsip ini juga memperlambat proses*

*pengambilan keputusan pada isu strategis yang mendesak. Penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk mengadaptasi penerapan prinsip non-interference agar lebih responsif terhadap tantangan kontemporer. Pendekatan yang lebih fleksibel dan mekanisme penegakan yang kuat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan regional. Dengan memperkuat identitas kolektif dan norma-norma regional, ASEAN dapat memperkuat stabilitas kawasan, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menghadapi tantangan global secara lebih responsif dan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** ASEAN Way, AEC, SCS, Two-Level Game Theory

## PENDAHULUAN

Asia Tenggara, sebagai salah satu kawasan paling dinamis di dunia, memiliki sejarah panjang konflik dan ketegangan geopolitik yang mengakar pada keberagaman budaya, etnis, dan politik. Untuk mengelola kompleksitas ini, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) didirikan pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN bertujuan menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera melalui kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Seiring waktu, ASEAN berkembang menjadi organisasi regional dengan sepuluh negara anggota, memainkan peran kunci dalam memperkuat stabilitas dan integrasi ekonomi Asia Tenggara.<sup>1</sup>

Sebagai organisasi dengan anggota yang memiliki latar belakang beragam, ASEAN mengembangkan pendekatan unik yang disebut ASEAN Way. Konsep ini didasarkan pada dialog informal, pengambilan keputusan berbasis konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota. Salah satu pilar utama ASEAN Way adalah prinsip non-interference, yaitu kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lain. Pendekatan ini bertujuan menjaga keharmonisan di antara negara anggota yang memiliki sistem politik, budaya, dan kepentingan nasional yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Prinsip non-interference lahir dari kebutuhan untuk membangun kepercayaan antarnegara anggota di tengah situasi pascakolonial dan perang dingin. Pada masa awal pembentukan ASEAN, banyak negara anggota yang baru merdeka dan sedang menghadapi tantangan internal seperti konflik domestik, ketidakstabilan politik, dan ancaman intervensi asing. Non-interference menjadi landasan untuk mengurangi potensi konflik antarnegara dan memberikan ruang bagi masing-masing negara untuk menyelesaikan masalah internal mereka tanpa tekanan eksternal. Namun, prinsip ini memiliki implikasi kompleks dalam menghadapi isu-isu transnasional, seperti sengketa di Laut Cina Selatan dan

<sup>1</sup> Albert, E., & Maizland, L. (2019). What is ASEAN. Council on Foreign Relations (CFR). Erişim Tarihi, 15, 2020.

<sup>2</sup> Goh, G. (2000). The 'ASEAN Way'. Pacific Review, 13(3), 439.

integrasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community (AEC). Dalam sengketa Laut Cina Selatan, misalnya, prinsip non-interference membatasi kemampuan ASEAN untuk mengambil sikap kolektif yang tegas. Hal ini memberikan celah bagi aktor eksternal seperti Tiongkok untuk memperkuat posisinya di kawasan, menciptakan ketegangan yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan maritim. Di sisi lain, dalam konteks AEC, prinsip ini terkadang menghambat harmonisasi kebijakan perdagangan dan investasi antarnegara anggota, yang dapat memengaruhi daya saing ASEAN sebagai kawasan ekonomi terpadu.

Implikasi lain yang signifikan adalah bagaimana prinsip ini memengaruhi stabilitas perdagangan secara keseluruhan. Di satu sisi, non-interference memungkinkan negara anggota untuk menjaga kedaulatan mereka, menciptakan stabilitas politik domestik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, pendekatan ini membatasi kemampuan ASEAN untuk menangani konflik lintas batas atau memajukan agenda bersama yang lebih progresif dalam integrasi ekonomi. Hal ini menciptakan dilema antara menjaga kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk memperkuat kerja sama regional yang mendalam.<sup>3</sup>

Untuk memahami dinamika ini, game theory, khususnya model "game level 2" dan teori konstruktivisme dapat digunakan sebagai alat analisis. Dalam model two-level game theory ini, interaksi antarnegara anggota ASEAN dapat dianalisis melalui dua level permainan: level domestik dan level regional/internasional. Pada level domestik, setiap negara mempertimbangkan kepentingan internalnya, seperti stabilitas politik atau tekanan dari pemangku kepentingan domestik. Sementara pada level regional, negara anggota harus menyeimbangkan kepentingan nasional mereka dengan tujuan kolektif ASEAN. Prinsip non-interference dapat dipahami sebagai strategi pada level regional untuk menjaga hubungan jangka panjang, meskipun kadang-kadang merugikan kepentingan jangka pendek di level domestik.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip non-interference dalam ASEAN Way, dengan fokus pada implikasinya terhadap stabilitas perdagangan dan keamanan di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, ASEAN Economic Community (AEC) menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi dinamika hubungan antarnegara anggota. Prinsip non-interference menghadirkan dilema antara mempertahankan kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk

<sup>3</sup> Prayetno, A. (2015). Kerja Sama Komunitas Asean 2015 Dalam Menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan). In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka (pp. 577-586).

<sup>4</sup> Chiou, Y. H. (2010). Unraveling the Logic of ASEAN's Decision-Making: Theoretical Analysis and Case Examination. *Asian Politics & Policy*, 2(3), 371-393.

memperkuat kerja sama regional, terutama dalam menghadapi isu-isu strategis seperti harmonisasi kebijakan perdagangan dan penyelesaian sengketa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan game theory, khususnya model game level 2, dan teori konstruktivisme untuk menjawab beberapa pertanyaan utama: (1) Bagaimana ASEAN mengelola dilema antara kedaulatan nasional dan kerja sama regional dalam kerangka prinsip non-interference? (2) Bagaimana model game level 2 dan teori konstruktivisme dapat menjelaskan dinamika hubungan antarnegara ASEAN dalam konteks AEC? (3) Apa implikasi dari penerapan prinsip non-interference terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara? Melalui analisis ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas prinsip non-interference serta rekomendasi untuk penguatan stabilitas kawasan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip non-interference dalam ASEAN Way memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara. Fokus utamanya adalah mengkaji interaksi antarnegara anggota ASEAN dalam mempertahankan prinsip non-interference, serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Kerangka penelitian ini mengintegrasikan perspektif hubungan internasional dengan teori normatif seperti **konstruktivisme** untuk memahami bagaimana prinsip non-interference diterapkan<sup>5</sup>, dan teori **two-level game theory**<sup>6</sup> untuk menganalisis implikasi strategisnya seperti konflik laut China Selatan dan kebijakan ekonomi dalam kerangka AEC.

Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur dan analisis dokumen. Dalam studi literatur, peneliti akan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi ASEAN seperti AEC Blueprint dan Piagam ASEAN, artikel jurnal akademik, buku, serta laporan lembaga think tank yang relevan. Selain itu, data ekonomi dan keamanan regional dari lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan UN juga akan digunakan. Analisis dokumen mencakup laporan tahunan ASEAN, risalah pertemuan tingkat tinggi, dan kesepakatan multilateral yang mencerminkan penerapan prinsip non-interference.

<sup>5</sup> Yunita, P. (2014). Analisis Perkembangan Integrasi Ekonomi ASEAN Menuju Pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 2015. *Journal of World Trade Studies*, 5(2), 67-83.

<sup>6</sup> Hor, S. (2022). ASEAN Policy towards the South China Sea: A Neoclassical Realism and Two-Level Games Analysis.

Teknik Analisis Data: Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi pola, narasi, dan prinsip utama terkait non-interference dalam ASEAN Way. Kedua, pendekatan komparatif digunakan untuk memahami variasi penerapan prinsip tersebut di berbagai negara anggota ASEAN dalam konteks ekonomi dan keamanan. Ketiga, pendekatan teoritis mengaitkan hasil analisis dengan teori konstruktivisme dan two-level game theory untuk mengevaluasi bagaimana prinsip non-interference memengaruhi stabilitas atau kerja sama regional. Terakhir, penelitian juga memanfaatkan studi kasus, seperti konflik Laut China Selatan<sup>7</sup> dan kebijakan ekonomi dalam kerangka ASEAN Economic Community<sup>8</sup>, untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam.

## Landasan Teori

### Two-level Game Theory

Konsep *two-level games*, yang dipopulerkan oleh Robert Putnam pada 1988, memberikan perspektif yang menarik untuk memahami dinamika pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Pendekatan ini menggambarkan pemimpin nasional sebagai individu yang harus mengelola dua arena politik secara bersamaan: arena domestik dan internasional. Di tingkat domestik, pemimpin menghadapi tekanan dari berbagai aktor seperti konstituen, partai politik, parlemen, dan kelompok kepentingan, yang semuanya memiliki harapan tertentu atas kebijakan yang diambil. Sementara itu, di tingkat internasional, pemimpin bertugas menjalin kesepakatan yang bermanfaat bagi negaranya, sekaligus dapat diterima oleh pihak-pihak internasional lainnya yang terlibat dalam negosiasi.

Kebijakan luar negeri jarang sekali bisa terlepas dari dinamika domestik. Faktanya, keputusan internasional hampir selalu membutuhkan dukungan atau ratifikasi domestik untuk dapat dijalankan. Sebagai contoh, referendum Brexit pada tahun 2016 menunjukkan bagaimana keputusan domestik Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa tidak hanya didorong oleh opini publik nasional tetapi juga mengubah pola hubungan internasional Inggris dengan negara-negara Eropa lainnya. Kasus ini menegaskan bahwa politik domestik dan internasional adalah dua sisi dari koin yang sama dan harus dipahami secara bersamaan untuk menganalisis kebijakan luar negeri secara komprehensif.

<sup>7</sup> Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini, Mifta Hanifah\* "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration." *Diponegoro Law Review*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 1-9.

<sup>8</sup> ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015)

Salah satu elemen inti dalam *two-level games* adalah konsep *win-set*, yang merujuk pada kumpulan hasil negosiasi internasional yang dapat diterima di tingkat domestik. Ukuran *win-set* sangat menentukan arah dan hasil negosiasi. Jika *win-set* cukup besar, pemimpin memiliki lebih banyak ruang untuk mencapai kesepakatan internasional karena terdapat lebih banyak opsi yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, *win-set* yang besar sering kali membuat posisi tawar pemimpin di tingkat internasional menjadi lebih lemah karena fleksibilitas yang terlalu besar. Sebaliknya, *win-set* yang kecil memungkinkan pemimpin untuk menekan pihak lain agar memberikan konsesi yang lebih besar. Contohnya terlihat dalam negosiasi perdagangan antara Kanada dan Uni Eropa, di mana parlemen Wallonia di Belgia menggunakan *win-set* domestik mereka yang kecil untuk menekan perubahan dalam perjanjian hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Namun, menjalankan *two-level games* tidak selalu berjalan mulus. Pemimpin sering kali dihadapkan pada dua risiko utama: **voluntary defection** dan **involuntary defection**. *Voluntary defection* terjadi ketika pemimpin sengaja mengingkari kesepakatan internasional untuk memenuhi tekanan domestik. Sementara itu, *involuntary defection* terjadi ketika pemimpin tidak mampu memenuhi kesepakatan internasional karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup di dalam negeri. Kedua risiko ini menggambarkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemimpin saat mencoba menyelaraskan kepentingan domestik dengan tuntutan internasional.

Tidak hanya pemerintah dan parlemen yang memainkan peran penting dalam *two-level games*, tetapi juga aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok advokasi transnasional. Organisasi seperti PBB dan WTO sering menjadi mediator yang memfasilitasi negosiasi antarnegara, sementara perusahaan multinasional dan jaringan advokasi transnasional sering kali memengaruhi opini publik domestik dan mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka dengan tuntutan global. Misalnya, dalam isu-isu lingkungan hidup, tekanan dari organisasi internasional dan kelompok advokasi dapat memengaruhi negara untuk mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan standar global.

Pendekatan *two-level games* memberikan wawasan yang mendalam tentang mengapa kerja sama internasional dapat terjadi meskipun terdapat perbedaan kepentingan yang signifikan antara aktor-aktor yang terlibat. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menjelaskan bagaimana konflik antara tingkat

domestik dan internasional dapat dikelola untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam dunia akademik, two-level games berfungsi sebagai jembatan antara studi politik domestik dan hubungan internasional. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana tipe rezim politik, seperti demokrasi atau otoritarianisme, memengaruhi ukuran win-set dan strategi negosiasi internasional. Selain itu, studi tentang negara-negara besar seperti China dan India dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana negara-negara ini menggunakan pengaruh domestik mereka untuk memperkuat posisi internasional.

Pada akhirnya, pendekatan two-level games adalah alat analisis yang kuat untuk memahami kompleksitas diplomasi modern. Dengan mengintegrasikan dinamika domestik dan internasional, pendekatan ini tidak hanya membantu memahami bagaimana kebijakan luar negeri dirumuskan, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut memengaruhi aktor-aktor di berbagai tingkatan. Dalam dunia yang semakin terhubung, pendekatan ini memberikan cara yang efektif untuk menganalisis dampak keputusan satu negara terhadap tatanan global secara keseluruhan.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Dan Norma Regional Asean Way

Sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, ASEAN memiliki karakteristik khusus yang tercermin dalam standar internal yang diterapkan oleh seluruh anggotanya sebagai identitas bersama. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan efektivitas pencapaian tujuan konsensus yang dijabarkan dalam Deklarasi ASEAN. Secara khusus, tujuan tersebut diterapkan melalui berbagai program dan kesepakatan bersama, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis, sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah internal. Prinsip yang dikenal sebagai ASEAN Way pun dibentuk untuk menciptakan perdamaian dan hubungan stabil, baik di tingkat global maupun regional.

Pada praktiknya, ASEAN Way memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas regional ASEAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang kuat. Namun, pelaksanaan prinsip dan norma dalam aktivitas regional ini tidak mengganggu identitas nasional negara-negara anggota, di mana kedaulatan tetap menjadi hal

<sup>9</sup> Eugénia da Conceição-Heldt dan Patrick A. Mello menjelaskan bahwa two-level games berperan penting dalam menjembatani politik domestik dan hubungan internasional melalui konsep "win-set," yang menentukan hasil negosiasi yang dapat diterima di kedua level tersebut (da Conceição-Heldt & Mello, 2017).

yang sangat penting. Oleh karena itu, meskipun prinsip dan norma ASEAN diterapkan pada kondisi regional dan internal negara anggota, pelaksanaannya tetap mengacu pada identitas dan kedaulatan masing-masing negara. Sebagai prinsip bersama, ASEAN Way mencakup norma yang berisi prinsip-prinsip seperti non-intervensi dan penyelesaian konflik secara damai, tanpa konfrontasi, dan berlandaskan musyawarah mufakat. Prinsip-prinsip inilah yang menjadikan ASEAN Way sebagai dasar penting bagi stabilitas keamanan dan pembangunan regional di kawasan ASEAN. Prinsip ini secara lengkap telah dituangkan dalam Pasal 2 Piagam ASEAN, yang mengidentifikasi berbagai prinsip yang harus dijaga oleh setiap negara anggota.<sup>10</sup>

ASEAN Way mencakup sejumlah prinsip yang disepakati bersama, antara lain: (1) penghormatan terhadap kedaulatan negara; (2) penghormatan terhadap kesetaraan dan integritas teritorial; (3) penghormatan terhadap identitas bersama; (4) penghormatan terhadap penyelesaian konflik internal negara anggota; (5) penghormatan terhadap hak negara anggota untuk mengelola wilayah teritorialnya tanpa campur tangan eksternal. Pada bagian lain, Pasal 20 Bab VII Piagam ASEAN juga menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan pada konsensus dan konsultasi bersama<sup>11</sup>.

### Prinsip Non-Interference

Prinsip **non-interference** atau non-intervensi merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka kerja ASEAN, yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara anggota. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah campur tangan dalam urusan domestik negara lain, sehingga menjaga stabilitas dan harmoni regional. Sejak pembentukannya pada tahun 1967, ASEAN telah mengadopsi prinsip non-intervensi sebagai landasan operasional. Prinsip ini tercermin dalam berbagai dokumen penting, seperti Deklarasi ASEAN 1967, Deklarasi Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) 1971, dan Piagam ASEAN 2008. Melalui prinsip ini, ASEAN berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerja sama regional tanpa adanya campur tangan eksternal dalam urusan domestik negara anggota.

Meskipun prinsip non-intervensi telah berkontribusi pada stabilitas regional, penerapannya tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa prinsip ini dapat menghambat respons ASEAN terhadap pelanggaran hak asasi

<sup>10</sup> Acharya, A. (2001). Constructing a Security Community in Southeast Asia. London: Routledge

<sup>11</sup> ASEAN. (2008). ASEAN Charter. Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>

manusia dan krisis politik di negara anggota. Sebagai contoh, dalam kasus krisis Rohingya di Myanmar, ASEAN menghadapi tekanan internasional untuk mengambil tindakan lebih tegas, namun terhambat oleh komitmen terhadap prinsip non-intervensi<sup>12</sup>.

Seiring dengan dinamika politik dan sosial di kawasan, terdapat dorongan untuk mereinterpretasi prinsip non-intervensi. Konsep seperti "constructive intervention" dan "flexible engagement" muncul sebagai upaya untuk memungkinkan ASEAN berperan lebih aktif dalam menangani isu-isu internal yang memiliki dampak regional<sup>13</sup>. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas regional.

Prinsip non-intervensi tetap menjadi elemen kunci dalam identitas dan operasional ASEAN. Namun, tantangan kontemporer menuntut ASEAN untuk menyesuaikan penerapan prinsip ini agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi isu-isu regional. Pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip non-intervensi tidak menjadi penghalang bagi penegakan hak asasi manusia dan stabilitas di kawasan.

### Integrasi Ekonomi ASEAN Economic Community

Integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara telah menjadi fokus utama sejak pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Upaya ini mencapai puncaknya dengan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi terpadu di antara negara-negara anggota. Untuk memahami dinamika integrasi ini, analisis melalui lensa konstruktivisme dan teori two-level game dalam hubungan internasional memberikan wawasan mendalam tentang interaksi antara faktor domestik dan regional.

Konstruktivisme menekankan peran identitas, norma, dan nilai dalam membentuk perilaku negara. Dalam konteks ASEAN, identitas kolektif sebagai komunitas regional yang mengedepankan kerja sama dan harmoni menjadi landasan utama integrasi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti non-intervensi, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota membentuk norma yang mengarahkan interaksi antarnegara. Pembentukan AEC mencerminkan upaya ASEAN untuk memperkuat identitas regional melalui

<sup>12</sup> Pohan, A. M. (2023). Prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN: Tantangan dan Peluang dalam Era Kontemporer. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 195-210. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.11>

<sup>13</sup> Pohan, A. M. (2009). *Prinsip Non-Intervensi dalam Perspektif ASEAN*. Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.

integrasi ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan bertahap dan berbasis konsensus, ASEAN berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerja sama ekonomi tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Pendekatan ini dikenal sebagai "ASEAN Way", yang menekankan diplomasi tenang dan pengambilan keputusan melalui musyawarah<sup>14</sup>. Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan. Proses pengambilan keputusan yang lambat dan kurangnya mekanisme penegakan yang kuat sering kali menghambat implementasi kebijakan integrasi. Selain itu, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara anggota menambah kompleksitas dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Teori two-level game yang diperkenalkan oleh Robert Putnam menyoroti bahwa pemimpin nasional harus menavigasi negosiasi di dua tingkat: domestik dan internasional. Dalam konteks AEC, negosiasi integrasi ekonomi melibatkan interaksi antara kepentingan domestik masing-masing negara anggota dan dinamika regional ASEAN. Di tingkat regional, negara-negara anggota ASEAN berupaya mencapai kesepakatan mengenai kebijakan integrasi ekonomi, seperti penghapusan tarif, liberalisasi jasa, dan harmonisasi standar. Negosiasi ini dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial antarnegara anggota. Misalnya, negara dengan ekonomi yang lebih maju mungkin mendorong liberalisasi yang lebih cepat, sementara negara berkembang mungkin menginginkan perlindungan lebih lama untuk industri domestik mereka. Di tingkat domestik, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan integrasi yang disepakati di tingkat regional dapat diterima oleh konstituen domestik, termasuk sektor bisnis, pekerja, dan masyarakat umum. Resistensi domestik dapat muncul jika kebijakan tersebut dianggap merugikan kepentingan nasional atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, liberalisasi sektor jasa mungkin menghadapi penolakan dari penyedia jasa lokal yang khawatir terhadap persaingan asing.

Interaksi antara kedua tingkat ini menciptakan dinamika kompleks dalam proses integrasi. Negosiasi di tingkat regional harus mempertimbangkan "win-set" domestik, yaitu kumpulan hasil yang dapat diterima oleh konstituen domestik. Semakin besar win-set domestik, semakin besar peluang untuk mencapai kesepakatan di tingkat internasional. Sebaliknya, win-set yang sempit dapat menghambat proses negosiasi dan implementasi kebijakan integrasi.

<sup>14</sup> Santoso, D. (2024). Tantangan dan implikasi integrasi ekonomi regional terhadap pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. *HumanTech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 15-28. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3648/2926>.

### Studi Kasus: Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pembentukan MEA pada tahun 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi terpadu di kawasan ASEAN. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang dapat dianalisis melalui lensa konstruktivisme dan two-level game theory. *Pendekatan Konstruktivisme*: Identitas kolektif ASEAN sebagai komunitas yang mengedepankan kerja sama dan harmoni menjadi landasan utama dalam pembentukan MEA. Namun, perbedaan kepentingan dan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara anggota menimbulkan tantangan dalam mencapai konsensus. Misalnya, negara dengan ekonomi yang lebih maju mungkin mendorong liberalisasi yang lebih cepat, sementara negara berkembang mungkin menginginkan perlindungan lebih lama untuk industri domestik mereka. Perbedaan ini mencerminkan identitas nasional yang beragam dan mempengaruhi dinamika integrasi. *Analisis Two-Level Game Theory*: Di tingkat domestik, pemerintah harus menyeimbangkan antara komitmen regional dan kepentingan nasional. Misalnya, liberalisasi sektor jasa mungkin menghadapi penolakan dari penyedia jasa lokal yang khawatir terhadap persaingan asing. Di tingkat regional, negosiasi harus mempertimbangkan perbedaan kepentingan dan kapasitas antarnegara anggota. Interaksi antara kedua tingkat ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan integrasi.

Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, integrasi ekonomi ASEAN melalui MEA masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas institusional, dan kepentingan nasional menjadi hambatan utama dalam proses integrasi. Selain itu, kurangnya mekanisme penegakan yang efektif dan komitmen politik yang kuat menghambat implementasi kebijakan integrasi. Namun, prospek integrasi ekonomi ASEAN tetap positif. Dengan memperkuat identitas kolektif dan komitmen terhadap norma-norma regional, ASEAN dapat mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, serta peningkatan kapasitas institusional, dapat mendorong proses integrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Integrasi ekonomi ASEAN melalui pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) mencerminkan upaya kolektif negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama regional dan meningkatkan daya saing ekonomi di kancah global. Pendekatan konstruktivisme menyoroti peran identitas, norma, dan nilai bersama dalam membentuk dinamika integrasi ini. Prinsip-prinsip seperti non-intervensi, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota

menjadi landasan interaksi antarnegara dalam kerangka AEC. Namun, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan kepentingan nasional menimbulkan tantangan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Melalui lensa two-level game theory, terlihat bahwa negosiasi integrasi ekonomi ASEAN melibatkan interaksi kompleks antara dinamika domestik dan regional. Pemerintah harus menyeimbangkan antara komitmen regional dan kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan tekanan domestik dari berbagai pemangku kepentingan. Interaksi antara kedua tingkat ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan integrasi.

Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas institusional, dan kepentingan nasional. Kurangnya mekanisme penegakan yang efektif dan komitmen politik yang kuat juga menghambat implementasi kebijakan integrasi. Namun, dengan memperkuat identitas kolektif dan komitmen terhadap norma-norma regional, ASEAN dapat mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, serta peningkatan kapasitas institusional, dapat mendorong proses integrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC mencerminkan upaya kolektif negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama regional dan meningkatkan daya saing ekonomi di kancah global. Pendekatan konstruktivisme dan two-level game theory memberikan wawasan mendalam tentang dinamika interaksi antara faktor domestik dan regional dalam proses integrasi ini. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat komitmen terhadap norma-norma regional, ASEAN memiliki potensi untuk mencapai integrasi ekonomi yang lebih mendalam dan berkelanjutan di masa depan.

### Sengketa Laut China Selatan

Laut China Selatan dengan luas 3,5 juta km<sup>2</sup> merupakan area perairan yang terbentang sepanjang 1,100 kilometer dari Selat Malaka di barat daya hingga ke Selat Taiwan di timur laut.



**Gambar 1.** Peta Tumpang Tindih Klaim di Laut Tiongkok Selatan

Dilihat dari peta tersebut, bahwa bersinggungan dan beririsan dengan perairan territorial negara lain, seperti China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Vietnam, hingga Indonesia. Daerah ini akan terus menimbulkan ketegangan geopolitik yang serius dan berkepanjangan karena posisi geografisnya yang strategis. Tidak hanya itu, bahkan memiliki kekayaan yang terkandung di sekitarnya dan juga jauh di dalam kawasan tersebut. Laut ini merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, yang menyimpan ekosistem laut yang kaya dan beragam, cadangan mineral dan gas alam yang besar, bahkan diperkirakan oleh pejabat di Amerika Serikat bahwa setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan memiliki kemungkinan terbesar menjadi cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Pada permulaan konflik sengketa ini, ketika China mengklaim hak historis atas perairan tersebut selama berabad-abad dan mengklaim bahwa LCS adalah bagian dari wilayahnya dengan konsep "ten-dash-line" (dulu nine-dash-line). Mengklaim lebih dari 95 persen wilayah Laut China Selatan, menjadikannya jalur penting untuk memasok sekitar 85 persen kebutuhan impor minyak mentahnya. Selain itu, China juga mengklaim sejumlah pulau kecil di kawasan ini dan telah mereklamasi sekitar 1.300 hektar lahan untuk mendukung infrastruktur militer, termasuk pembangunan landasan pacu yang mampu menampung pesawat pengebom.<sup>15</sup>

Klaim China ini tentunya tumpang tindih dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Filipina sempat menuntut China melalui Permanent Court of Arbitration (PCA), dalam sengketa gugatan tersebut bersifat final dan tidak dapat banding, namun tidak memiliki kekuatan mengikat yang bersifat memaksa. Namun, dalam pelaksanaannya dikeluarkanlah putusan bahwa PCA menetapkan tuntutan Filipina sah, di mana China harus menghormati hak berdaulat Filipina

<sup>15</sup> Sun, W. (2016). Initiation and evolution of the South China Sea: an overview. *Acta Geochimica*, 35, 215-225.

baik di wilayah ZEE maupun di luarnya di wilayah Laut China Selatan, serta tidak menghalangi hak tersebut dalam bentuk tindakan apapun.<sup>16</sup>

Selama ratusan tahun, Laut China Selatan memiliki peran vital dalam menunjang perekonomian negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Negara-negara yang tidak mengklaim kawasan ini juga memiliki kepentingan tersendiri. Contohnya, kawasan perikanan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan menyimpan cadangan gas alam strategis bagi Indonesia. Selain itu, Korea Selatan dan Jepang, meskipun tidak mengklaim kepemilikan atas Laut China Selatan, sangat bergantung pada kawasan ini untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi mereka. Sementara itu, Amerika Serikat, yang menjaga kepentingan nasionalnya dan melindungi sekutu-sekutunya, tetap mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Angkatan Laut AS bahkan berencana meningkatkan jumlah armada Pasifik yang bertugas di luar negeri hingga sekitar 30 persen pada tahun 2021.

Banyak yang berpendapat bahwa ASEAN Way tidak cukup efektif dalam menangani ketidakseimbangan kekuatan di kawasan. Namun, dari sudut pandang konstruktivisme, identitas dan norma memainkan peran penting dalam membentuk perilaku negara. Dalam konteks Laut China Selatan (LCS), nilai-nilai yang dipegang oleh negara-negara ASEAN, seperti prinsip konsensus dan saling menghormati kedaulatan, menjadi dasar interaksi antar negara anggota. Pendekatan ASEAN yang mengutamakan diplomasi tenang dan penyelesaian sengketa tanpa konfrontasi menciptakan ruang untuk resolusi yang tidak bergantung pada kekuatan atau ancaman militer. Nilai-nilai ini membentuk identitas kolektif ASEAN sebagai komunitas yang mengedepankan kerjasama dan harmoni regional.

ASEAN, misalnya, menekankan prinsip Code of Conduct untuk Laut China Selatan yang sedang dirundingkan dengan China sebagai cara untuk mengurangi ketegangan, meskipun belum ada kesepakatan resmi. Ini menunjukkan bagaimana ASEAN berusaha menjaga stabilitas kawasan melalui pendekatan yang hati-hati dan bertahap. Keuntungan dari penerapan ASEAN Way dalam kasus ini adalah kemampuannya untuk menjaga kesatuan dan solidaritas antara negara-negara ASEAN. Pendekatan berbasis konsensus ini memungkinkan negara-negara anggota untuk bersatu dalam menghadapi klaim China tanpa memperburuk

<sup>16</sup> Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini, Mifta Hanifah\* "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration." *Diponegoro Law Review*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 1-9.

hubungan di dalam kawasan. Melalui pembentukan forum negosiasi dan perjanjian bersama, mekanisme normatif ASEAN Way telah terbukti mempengaruhi perilaku negara-negara anggota. Konstruktivisme juga dapat menjelaskan bagaimana China mulai menyesuaikan diri dengan regionalisme ASEAN, terutama setelah penandatanganan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) pada tahun 2003. Dalam hal ini, kedua belah pihak bertindak berdasarkan norma yang telah disepakati bersama sebagai jalan penyelesaian konflik, dengan ASEAN Way sebagai code of conduct.<sup>17</sup>

Konflik Laut China Selatan dimulai dengan agresivitas China yang memicu klaim dari negara-negara lain. Insiden Mischief Reef 1995, di mana Filipina menemukan struktur besi yang diklaim China, mendorong pembentukan code of conduct untuk mengelola konflik tersebut. ASEAN kemudian menjadi fasilitator dalam negosiasi melalui KTT ASEAN ke-29 pada 1996 untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Filipina juga mengusulkan masalah ini dibawa ke ASEAN Regional Forum (ARF), namun China menolak keterlibatan pihak eksternal seperti AS dan Jepang. Meski demikian, China akhirnya melunak dan mulai menerima norma ASEAN, akibat intervensi kekuatan eksternal yang memperkuat posisi AS di kawasan. Kekhawatiran China terhadap melemahnya hegemoni mendorongnya mengembangkan 'konsep keamanan baru' dan membentuk ASEAN Plus Three (APT) pada 2002 sebagai dasar kebijakan luar negeri dan hubungan dengan ASEAN. APT menjadi titik balik penerimaan China terhadap multilateralisme dan ASEAN Way, dengan menyetujui TAC pada 2003. Forum ini berfungsi sebagai tempat rekonsiliasi, kerjasama, dan membangun kepercayaan antar pihak. China kemudian menunjukkan perilaku yang lebih moderat, menyesuaikan diri dengan forum multilateral dan menerima prinsip-prinsip diplomasi ASEAN<sup>18</sup>.

Namun, ada juga kelemahan yang muncul dari pendekatan ASEAN Way ini. Lambatnya kemajuan dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan menjadi salah satu kritik utama. Ketika ASEAN mengedepankan konsensus, proses pengambilan keputusan menjadi sangat lambat dan tidak efektif dalam menghadapi tantangan yang mendesak. China seringkali memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat klaim dan keberadaan militernya di wilayah yang disengketakan. Hal ini memunculkan ketegangan di antara negara-negara anggota ASEAN yang lebih terdampak, seperti Filipina dan Vietnam, yang merasa bahwa ASEAN terlalu lembek dalam menghadapi ekspansi China di Laut China Selatan.

<sup>17</sup> B. Wijanarko. (2016). Perspektif Indonesia terhadap Overlapping Claim Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna dengan Nine Dash Lines China,

<sup>18</sup> Rachmawati, D. (2021). Analisis Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan dengan Perspektif Konstruktivisme.

Misalnya, meskipun keputusan putusan Pengadilan Arbitrase Internasional 2016 yang mendukung Filipina, ASEAN tidak mengambil langkah lebih tegas untuk mendesak China untuk mematuhi keputusan tersebut.

Prinsip non-intervensi juga mempersulit ASEAN untuk mengambil langkah konkret terhadap tindakan sepihak China di Laut China Selatan. Negara-negara anggota seperti Filipina dan Vietnam sering merasa tertekan karena kurangnya konsensus yang kuat untuk mendukung tindakan lebih tegas. ASEAN Way, yang menghindari sanksi atau intervensi langsung, membuat ASEAN terlihat kurang efektif dalam menanggapi agresi di Laut China Selatan. Meski demikian, pendekatan ini juga mencerminkan komitmen ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan dengan menghindari eskalasi konfrontasi langsung dengan China, yang bisa memperburuk ketegangan jika tidak ditangani dengan hati-hati.

ASEAN Way menunjukkan upaya ASEAN untuk mencari solusi damai dan menghindari konflik terbuka. Namun, pendekatan ini menghadapi tantangan dalam hal efektivitas, terutama terkait kecepatan dan ketegasan dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, ASEAN perlu menilai kembali apakah prinsip-prinsip dasar ini masih relevan dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Prinsip **non-interference** dan **konsensus** dalam ASEAN telah berperan penting dalam menjaga stabilitas regional dengan mencegah eskalasi konflik antarnegara anggota. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara ASEAN untuk bekerja sama tanpa campur tangan dalam urusan domestik masing-masing, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan pembangunan ekonomi. Namun, dalam konteks sengketa Laut China Selatan, prinsip-prinsip ini menghadirkan tantangan signifikan. Pendekatan konsensus sering kali mengakibatkan lambatnya respons ASEAN terhadap tindakan asertif China di wilayah tersebut, karena diperlukan persetujuan dari semua anggota sebelum mengambil tindakan kolektif. Hal ini memberikan ruang bagi China untuk memperkuat klaimnya tanpa menghadapi perlawanan terpadu dari ASEAN. Sebagai contoh, meskipun Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 memutuskan mendukung Filipina, ASEAN tidak mengambil langkah tegas untuk menekan China agar mematuhi keputusan tersebut<sup>19</sup>.

Identitas ASEAN sebagai komunitas regional tidak hanya dibentuk oleh interaksi internal antarnegara anggota, tetapi juga oleh hubungan dengan aktor

<sup>19</sup> Simões, L. (2022). The Role of ASEAN in the South China Sea Disputes. *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2022/06/23/the-role-of-asean-in-the-south-china-sea-disputes/>

eksternal seperti Amerika Serikat dan China. Hubungan eksternal ini dapat memperkuat atau melemahkan norma internal ASEAN. Misalnya, keterlibatan aktif AS dalam isu keamanan regional dapat mendorong ASEAN untuk lebih menegaskan prinsip-prinsipnya dalam menghadapi tekanan eksternal. Sebaliknya, ketergantungan ekonomi yang tinggi pada China dapat menyebabkan beberapa negara anggota enggan mengambil sikap yang mungkin dianggap konfrontatif terhadap Beijing, sehingga melemahkan solidaritas dan konsensus ASEAN dalam menangani isu-isu sensitif<sup>20</sup>. Oleh karena itu, interaksi dengan aktor eksternal memainkan peran krusial dalam membentuk dinamika internal ASEAN dan efektivitas penerapan norma-normanya.

Konflik di Laut China Selatan melibatkan interaksi kompleks antara dinamika domestik dan internasional, yang dapat dianalisis melalui kerangka *two-level game theory* yang diperkenalkan oleh Robert Putnam pada tahun 1988. Teori ini menyoroti bagaimana pemimpin nasional harus menavigasi negosiasi di dua tingkat: domestik dan internasional, dengan setiap tingkat saling mempengaruhi dan menentukan hasil kebijakan luar negeri.

Di tingkat internasional, negara-negara ASEAN berupaya menegosiasikan kesepakatan dengan China terkait klaim teritorial di Laut China Selatan. Negosiasi ini mencakup upaya untuk mencapai Code of Conduct (CoC) yang bertujuan mengatur perilaku di wilayah tersebut dan mencegah eskalasi konflik. Namun, proses ini sering terhambat oleh perbedaan kepentingan dan strategi antara negara-negara anggota ASEAN dan China.

Di tingkat domestik, masing-masing negara anggota ASEAN menghadapi tekanan internal yang mempengaruhi posisi mereka dalam negosiasi internasional. Misalnya, Filipina, setelah memenangkan putusan di Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016, menghadapi tekanan domestik untuk menegakkan kedaulatannya. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina memilih pendekatan yang lebih lunak terhadap China, yang mencerminkan dinamika politik domestik dan kepentingan ekonomi<sup>21</sup>.

Interaksi antara kedua tingkat ini menciptakan dinamika yang kompleks. Negosiasi internasional (Level I) harus mempertimbangkan win-set domestik, yaitu kumpulan hasil yang dapat diterima oleh konstituen domestik (Level II). Ukuran win-set ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti opini publik, tekanan

<sup>20</sup> Acharya, A. (2023). ASEAN's Evolving Regional Identity and External Dynamics. *International Affairs*, 99(3), 1003–1025. <https://doi.org/10.1093/ia/iaad107>

<sup>21</sup> Andrade, R. M. (2018). The South China Sea Dispute in Perspective: ASEAN Way, International Law, and Realpolitik. *Brazilian Journal of International Relations*, 40(2), 5–25. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-8529.2018400200005>

politik, dan kepentingan ekonomi domestik. Sebagai contoh, Malaysia cenderung mengambil pendekatan yang lebih diplomatis terhadap China, sebagian karena pertimbangan ekonomi domestik dan hubungan perdagangan yang erat<sup>22</sup>. Pendekatan ASEAN Way, yang menekankan prinsip non-intervensi dan konsensus, juga dapat dianalisis melalui two-level game theory. Di satu sisi, prinsip ini membantu menjaga kesatuan ASEAN dengan menghindari konfrontasi langsung. Namun, di sisi lain, pendekatan ini dapat memperkecil win-set di tingkat internasional, karena keputusan harus disepakati oleh semua anggota, yang sering kali memperlambat respons terhadap tindakan asertif China di Laut China Selatan<sup>23</sup>.

Melalui lensa two-level game theory, jelas bahwa penyelesaian konflik di Laut China Selatan memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi antara dinamika domestik dan internasional. Negosiasi yang berhasil harus mempertimbangkan tekanan domestik di masing-masing negara, sambil mencari solusi yang dapat diterima di tingkat internasional. Pendekatan ini menyoroti pentingnya strategi yang seimbang dan adaptif dalam diplomasi multilateral.

### Dampak Ke Stabilitas Ekonomi-Keamanan di ASEAN

Stabilitas ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara merupakan isu krusial yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika, termasuk integrasi ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sengketa teritorial di Laut China Selatan. Untuk memahami kompleksitas ini, analisis melalui perspektif konstruktivisme dan teori two-level games memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana identitas, norma, serta interaksi antara dinamika domestik dan internasional membentuk perilaku negara-negara anggota ASEAN. MEA, yang diresmikan pada tahun 2015, bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi terintegrasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan daya saing kawasan, menarik investasi asing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara anggota menimbulkan tantangan dalam mencapai integrasi yang lebih dalam. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki infrastruktur dan kapasitas industri lebih maju dibandingkan dengan Laos atau Myanmar, yang

<sup>22</sup> Paskal, C. (2015). The Game Theory: Malaysia's Position in South China Sea towards China's String of Pearls Strategy. *Academia.edu*. Retrieved from [https://www.academia.edu/17017484/The\\_Game\\_Theory\\_Malaysia\\_s\\_position\\_in\\_South\\_China\\_Sea\\_towards\\_China\\_s\\_String\\_of\\_Pearls\\_strategy](https://www.academia.edu/17017484/The_Game_Theory_Malaysia_s_position_in_South_China_Sea_towards_China_s_String_of_Pearls_strategy)

<sup>23</sup> Hor, S. (2022). *ASEAN Policy towards the South China Sea: A Neoclassical Realism and Two-Level Games Analysis*[Master's Thesis]. Linnaeus University.

dapat menyebabkan ketimpangan dalam manfaat yang diperoleh dari integrasi ekonomi.

Dari perspektif konstruktivisme, identitas kolektif ASEAN sebagai komunitas yang mengedepankan kerja sama dan harmoni menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan ini. Norma-norma seperti non-intervensi dan konsensus membantu menjaga kohesi regional, meskipun terkadang memperlambat proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara anggota bekerja sama tanpa campur tangan dalam urusan domestik masing-masing, sehingga menciptakan lingkungan kondusif bagi perdamaian dan pembangunan ekonomi. Namun, prinsip non-intervensi juga menghadirkan tantangan dalam konteks integrasi ekonomi. Kurangnya mekanisme penegakan yang kuat dapat menghambat implementasi kebijakan bersama dan mengurangi efektivitas MEA dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh, perbedaan regulasi dan standar nasional dapat menjadi hambatan dalam perdagangan intra-ASEAN, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas ekonomi kawasan.

Sengketa teritorial di Laut China Selatan melibatkan klaim tumpang tindih antara China dan beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Wilayah ini memiliki nilai strategis dan ekonomi signifikan, dengan cadangan sumber daya alam melimpah dan jalur pelayaran internasional vital. Ketegangan di wilayah ini dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan dan mengganggu arus perdagangan internasional. Dalam menghadapi sengketa ini, ASEAN mengedepankan pendekatan diplomasi dan dialog melalui mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan upaya merumuskan Code of Conduct (CoC) dengan China. Pendekatan ini sejalan dengan norma non-intervensi dan konsensus yang menjadi ciri khas ASEAN. Namun, kurangnya respons tegas terhadap tindakan asertif China di wilayah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatan ini dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Dari perspektif konstruktivisme, identitas kolektif ASEAN sebagai komunitas yang mengedepankan kerja sama dan harmoni menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan ini. Norma-norma seperti non-intervensi dan konsensus membantu menjaga kohesi regional, meskipun terkadang memperlambat proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara anggota bekerja sama tanpa campur tangan dalam urusan domestik masing-masing, sehingga menciptakan lingkungan kondusif bagi perdamaian dan pembangunan ekonomi.

Teori two-level games, yang diperkenalkan oleh Robert Putnam pada tahun 1988, menyoroti bagaimana pemimpin nasional harus menavigasi negosiasi di dua tingkat: domestik dan internasional, dengan setiap tingkat saling mempengaruhi dan menentukan hasil kebijakan luar negeri. Dalam konteks ASEAN, negara-negara anggota menghadapi tekanan domestik untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional, sementara di tingkat internasional, mereka harus menavigasi hubungan dengan China dan aktor eksternal lainnya. Negosiasi internasional harus mempertimbangkan win-set domestik, yaitu kumpulan hasil yang dapat diterima oleh konstituen domestik. Ukuran win-set ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti opini publik, tekanan politik, dan kepentingan ekonomi domestik. Sebagai contoh, Malaysia cenderung mengambil pendekatan lebih diplomatis terhadap China, sebagian karena pertimbangan ekonomi domestik dan hubungan perdagangan yang erat. Pendekatan ASEAN Way, yang menekankan prinsip non-intervensi dan konsensus, juga dapat dianalisis melalui two-level game theory. Di satu sisi, prinsip ini membantu menjaga kesatuan ASEAN dengan menghindari konfrontasi langsung. Namun, di sisi lain, pendekatan ini dapat memperkecil win-set di tingkat internasional, karena keputusan harus disepakati oleh semua anggota, yang sering kali memperlambat respons terhadap tindakan asertif China di Laut China Selatan.

Stabilitas ekonomi dan keamanan di ASEAN dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk integrasi ekonomi melalui MEA dan sengketa teritorial di Laut China Selatan. Analisis melalui perspektif konstruktivisme dan teori two-level games menunjukkan bahwa identitas, norma, dan interaksi antara dinamika domestik dan internasional memainkan peran penting dalam membentuk perilaku negara-negara anggota. Memahami kompleksitas ini membantu ASEAN dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Integrasi ekonomi melalui MEA telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan. Namun, perbedaan tingkat pembangunan antarnegara anggota menimbulkan tantangan dalam mencapai integrasi yang lebih dalam. Dari perspektif konstruktivisme, identitas kolektif ASEAN sebagai komunitas yang mengedepankan kerja sama dan harmoni menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan ini. Norma-norma seperti non-intervensi dan konsensus membantu menjaga kohesi regional, meskipun terkadang memperlambat proses pengambilan keputusan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis prinsip non-interference dalam ASEAN Way dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara. Prinsip ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas regional, dengan menekankan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota. Meskipun efektif dalam menghindari konflik antarnegara, kerap prinsip ini menjadi penghambat respons kolektif ASEAN terhadap isu-isu transnasional. AEC bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi terpadu. Namun, perbedaan tingkat pembangunan antarnegara anggota menjadi tantangan utama. Norma seperti konsensus dan non-intervensi membantu menjaga kohesi regional, tetapi pendekatan berbasis musyawarah ini sering memperlambat pengambilan keputusan. Sedangkan, Sengketa LCS ini mencerminkan kelemahan prinsip non-interference, terutama dalam menghadapi tindakan asertif China. Namun, pendekatan ASEAN Way, yang menekankan dialog dan konsensus, efektif menjaga solidaritas internal tetapi tidak cukup tegas dalam menekan pihak eksternal. Tetapi, non-intervensi dan konsensus tetap membantu menjaga kohesi regional, meskipun terkadang memperlambat proses pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2023). ASEAN's Evolving Regional Identity and External Dynamics. *International Affairs*, 99(3), 1003–1025. <https://doi.org/10.1093/ia/iiad107>
- Acharya, A. (2001). Constructing a Security Community in Southeast Asia. London: Routledge
- Albert, E., & Maizland, L. (2019). What is ASEAN. Council on Foreign Relations (CFR). Erişim Tarihi, 15, 2020.
- Andrade, R. M. (2018). The South China Sea Dispute in Perspective: ASEAN Way, International Law, and Realpolitik. *Brazilian Journal of International Relations*, 40(2), 5–25. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-8529.2018400200005>
- ASEAN. (2008). ASEAN Charter. Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>
- ASEAN Secretariat. ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015.
- B. Wijanarko. (2016). Perspektif Indonesia terhadap Overlapping Claim Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna dengan Nine Dash Lines China,
- Chiou, Y. H. (2010). Unraveling the Logic of ASEAN's Decision-Making: Theoretical Analysis and Case Examination. *Asian Politics & Policy*, 2(3), 371-393.

- Da Conceição-Heldt, E., & Mello, P. A. (2017). Two-Level Games in Foreign Policy Analysis. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.496>
- Goh, G. (2000). The 'ASEAN Way'. *Pacific Review*, 13(3), 439.
- Hor, S. (2022). ASEAN Policy towards the South China Sea: A Neoclassical Realism and Two-Level Games Analysis[Master's Thesis]. Linnaeus University.
- Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini, Mifta Hanifah\* "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration." *Diponegoro Law Review*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 1-9.
- Paskal, C. (2015). The Game Theory: Malaysia's Position in South China Sea towards China's String of Pearls Strategy. *Academia.edu*. Retrieved from [https://www.academia.edu/17017484/The\\_Game\\_Theory\\_Malaysia\\_s\\_position\\_in\\_South\\_China\\_Sea\\_towards\\_China\\_s\\_String\\_of\\_Pearls\\_strategy](https://www.academia.edu/17017484/The_Game_Theory_Malaysia_s_position_in_South_China_Sea_towards_China_s_String_of_Pearls_strategy)
- Pohan, A. M. (2009). Prinsip Non-Intervensi dalam Perspektif ASEAN. Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.
- Pohan, A. M. (2023). Prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN: Tantangan dan Peluang dalam Era Kontemporer. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 195-210. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.11>
- Prayetno, A. (2015). Kerja Sama Komunitas Asean 2015 Dalam Menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Ganguan). In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka (pp. 577-586).
- Rachmawati, D. (2021). Analisis Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan dengan Perspektif Konstruktivisme.
- Santoso, D. (2024). Tantangan dan implikasi integrasi ekonomi regional terhadap pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. *HumanTech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 15-28. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3648/2926>.
- Simões, L. (2022). The Role of ASEAN in the South China Sea Disputes. *E-International Relations*. Retrieved from <https://www.e-ir.info/2022/06/23/the-role-of-asean-in-the-south-china-sea-disputes/>
- Sun, W. (2016). Initiation and evolution of the South China Sea: an overview. *Acta Geochimica*, 35, 215-225.